KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kajian grdung baru DPR segera rampung
Tanggal : Sabtu, 04 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 6

Kajian Gedung Baru DPR Segera Rampung

Duit Rp 601 miliar telah dianggarkan.

Hussein Abri Dongoran
Hussein.abri@tempo.co.id

TEMPO/DHEMAS REVIYANTO



Poster rancangan Menara Nusantara, gedung baru untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 26 Oktober lalu.

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera merampungkan kajian pembangunan gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan hasil itu segera keluar karena pada pekan ini tim kajian sedang mengolah data pengecekan gedung. "Pertengahan November selesai," kata dia ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Danis menjelaskan, beberapa bagian yang dicek oleh tim peneliti itu adalah pengukuran gedung serta pengumpulan sampel material, beton, dan baja. Selain itu, tim mengecek lift, tangga darurat, hingga ruangan yang ada di Nusantara I. Gedung Nusantara I merupakan kantor bagi 560 anggota Dewan.

Hasil sementara, tutur Danis, tim tidak menemukan kemiringan gedung. "Dari berbagai sudut yang kami ukur, bangunan memenuhi aspek keamanan," ujarnya. Tapi, ucap dia, dari aspek keselamatan, gedung itu dianggap tidak layak karena lift rusak serta tangga darurat dipenuhi berbagai barang, yang berbahaya jika gedung terbakar. "Kalau jumlah orang di gedung bisa mencapai 4.000, ini sangat tidak layak."

Selain itu, Danis menambahkan, tim mengecek ruang anggota Dewan, hingga jumlah toilet di setiap lantainya. Hasilnya, menurut dia, dua tempat tersebut sangat tidak nyaman karena jauh dari standar yang ditentukan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, ruang kerja anggota DPR seluas 117 meter persegi. Adapun saat ini luasnya sekitar 48 meter persegi.

Meski begitu, Danis belum mau menyebutkan apakah hasil rekomendasi Kementerian PUPR berupa renovasi atau penambahan gedung. Karena, kata dia, hasil penelitian dan pengembangan akan dikaji kembali oleh ahli struktur, permukiman, dan arsitek. "Ukuran per meter persegi belum diketahui," ujarnya. "Dan Rp 601 miliar itu cukup atau tidak, tergantung harga per meternya."

Pembangunan gedung DPR yang kerap mendapat kritik dari masyarakat bakal terwujud. Sebab, dana Rp 601 miliar yang dimaksudkan Danis masuk dalam pagu anggaran Sekretariat Jenderal DPR dengan nilai total Rp 5,7 triliun. Dana itu ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Nantinya, sebanyak Rp 601 miliar akan digunakan untuk tahap awal mega-proyek DPR. Rinciannya, Rp 320 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar untuk alun-alun demokrasi.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, menuturkan lembaganya menyerahkan sepenuhnya penghitungan anggaran gedung kepada Kementerian PUPR. Selain itu, menurut dia, nantinya desain akan berubah dari hasil sayembara desain pada 2015. "Ini kan perencanaannya dari awal, dari perencana hingga manajemen konstruksi," ujarnya. "Dan barulah dibangun."

Menurut peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, dari sisi anggaran, pembangunan gedung ini mencurigakan. Sebab, sudah ada dana Rp 601 miliar, tapi DPR dan pemerintah masih menghitung ulang. "Ini mengkhawatirkan dan rawan diselewengkan karena dana konsultasi sangat besar, dan duit konsultasi sebelumnya terbuang sia-sia," katanya. ● AHMAD FAIZ